(43) sup. 8 Purusorys

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Fenunggalan, dan Penegerian Sekolah Henengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mergingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - 2. Keputusan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Magerhatikan

: Fersetujuan Monteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Bostapkan

7

Pertana

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMF Negeri menjadi SMF Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
 - dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Telima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

ar onem

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Le tujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

I-delapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SCETANTO WIRJOFRASONTO

Keputusaniini disampaikan kepada

MAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Sekretariat Negara,

Sekretariat Kabinet.

- Serua Menteri Koordinator,

- Samua Menteri Negara.

5 Serua Menteri,

Serua Henteri Huda,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendi-

dikan dan Kebudayaan,

Tajen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,

- Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

💮 🛸 🚾 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

- See Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

Kebudayaan,

REPUBLIK

A 4430

Pemeriksa Keuangan,

Anggaran,

Inties. Pajak.

Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,

Same Tantor Perbendaharaan Negara,

- Liministrasi Kepegawaian Negara,

- La tara Administrasi Negara,

DPR-RI,

Temisi IX DPR-RI,

💮 🔙 wrsangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Fenyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,

a. Djamilah

P:130353307

1	2	3	
		13.SMP Negeri 3 Purworejo Klampok	-
		4.SMP Negeri 4 Pekalongan	-
		45.SMP Neger1 2 Wiradesa	-
		16.SMP Negeri 2 Limpung	-
		17.SMP Negeri 2 Tulis	-
		48.SMP Negeri Bulakamba	-
		49.SMP Negeri 2 Bumiayu	-
		50.SMP Negeri 13 Tegal	-
		51.SMP Negeri 3 Adiwerna	-
		52.SMP Negeri 3 Slawi	
		53.SMP Negeri 5 Femalang	
		Sh.SFP Negeri Mojotengah	
		55.SMF Negeri Karimun Jawa	
		56.SMF Negeri 5 Fati	

5	6
Purworejo Klampok	Kabupaten Banjarnegara
Pekalongan Barat	Kotamadya Pekalongan
Wiradesa	Kabupaten Pekalongan
Linpung	Kabupaten Batang
Pulis	Kabupaten Batang
Bulakamba	Kabupaten Brebes
Bumiayu	Kabupaten Brebes
Megal Barat	Kotamadya Tegal
Adiwerna	Kabupaten Tegal
Slawi	Kabupaten Tegal
Pemalang	Kabupaten Femalang
Mojotengah	Kabupaten Wonosobo
Karimun Jawa	Kabupaten Jepara
Fati	Kabupaten Fati

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROFINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil 285302 Umum: 285301 Telex: 22262 PK WIL SM

NOTA TUGAS Nomor: 599 / 103 /C 85

Sambil menunggu Surat Keputusan Kepala Sekolah yang difinitip dari pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi - dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah menetapkan:

N a m a : Basiran Endo Pranoto

N I P : 130 077 062

Jabatan : Kepala SLE 2 Klampok

Kabupaten Banjarnegara

untuk merangkap jabatan sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT)

Kepala SMP / SMAX 3 Purworejo Klampok

Kabupaten Banjarnegara

terhitung mulai tanggal : 20 - Maret - 1985

Yang bersangkutan diberi wewenang:

- 1. Menandatangani Daftar Gaji dan Keuangan lain yang berhubungan dengan KPN .
- 2. Menandatangani dan menerbitkan SPTKG .
- 3. Surat-surat lain sehubungan dengan jabatannya .

Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum .

Semanang, 25 Maret 1985 Kepala Kantor Wilayah,

TEMBUSAN YTH:

Drs. SOEJATTA

NIP. 130430070

- 1. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
- 2. Kepala Bagian Kepegawaian Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
- 3. Kepala KPN . Purwokerto
- 4. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya: Banjarnegara
- 5. Pengawas SMP/SMA untuk Wilayah Kab/Kodga Banjernegara
- 6. Kepala SMP / SMAX 3 Purworejo Klannok Kab. Banjaenegara

lopy , watch As, 1 Wh As , I untah prinches, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH Jln. Pemuda no. 134 Telp. 285301-285302 Semp INSTRUKSI No. 827/103/C.1984. I. Dasar. 1. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tg.12-3 -1983 no.0173/0/83. 2. SK Henteri Keuangan tg.12-3-1980 no.347/XXIII/3/1980. 3. Pengesahan DIP pelaksanaan Pembangunan Gedung-gedung sekolah baru tahun 1983/1984. II. Diintruksikan kepada: 1. Para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ka bupaten/Kotamadya se Jawa Tengah. 2. Para Kepala Sekolah SMP dan SMA Negeri yang nama-namanya ter cantum dalam kolom 5 lampiran surat instruksi ini. III. Supaya.

1. Yang tersebut II.I melaksanakan koordinasi fungsional dengan pejabat-pejabat di daerahnya masing-masing guna menyiapkan sekolah baru yang akan dibuka pada tahun ajaran 1984/1985, seperti yang tersebut pada kolom 4 daftar lampiran. 2. Yang tersebut II.2. a. Melaksanakan pendaftaran calon murid baru dan mengadakan seleksi guna persiapan sekolah baru tersebut di atas. b. Memimpin dan mengelolakan sekolah baru yang dipersiapkan tersebut, sampai saat peresmian dan ditunjuk Kepala yang baru. IV. Petunjuk pelaksanaan. 1. Pelaksanaan penerimaan murid baru mengikuti peraturan dan ketentuan/Juk.lak yang ada. 2. Sebelum Gedung sekolah yang sedang di bangun jadi, kelas yang baru itu dititipkan pada Sekolah Dasar, SMP atau SMA Negeri yang terdekat dengan lokasi bangunan. 3. Jumlah kelas maksimum 3(tiga) kelas, masing-masing 48 orang murid. 4. Tenaga pengajar dapat diambil putra daerah setempat, dari Guru-guru Negeri yang relevans atau guru/pejabat jajaran Depdikbud, exponen potensial di daerah, yang berkelayakan, sebagai guru Tidak Tetap (GTT): Demikian pula untuk tenaga TT. 5. Tenaga-tenaga yang tersebut IV,5 supaya diusulkan untuk di angkat sebagai Guru Tidak Tetap, kepada Bidang Dikmenum oleh Kepala Sekolah yang tersebut II.2. 6. Dana pendukung kegiatan program kurikulum dan honorarium bagi Guru/TU bagi sekolah berasal dari SPP. 7. Besarnya katagori dan SPP, disamakan dengan sekolah-sekolah negeri sejenis yang terdekat. 8. Uang SPP yang diterima tidak perlu disetor. 9. Pengelolaan uang SPP berpedoman dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada bidang Dikmenum. TEBUSAN KEPADA YTH. teluarkan di SEMARANG 1. Direktur Jenderal PDM Depd : 18 Hei 1984. 2 Direktur Dikmenum Ditjen Mandor Wilayah JI SHEPROPINSI .Gebermur KDH TK.I Prop

Daftar: Lampiran Surat Instruksi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Tanggal: 18 Mei 1984

Nomor : 827/103/1,84

Kepala Sekolah yang ditugaskan mengelola :

lo. K	abupaten/Kotamadya	Kecamatan/Desa	Nama Sekolah yang di siapkan	Kepala Sekolah yang ditugaskan
1	2	3	4	5
2	odya Semarang odya Semarang ab. Semarang ab. Semarang ab. Grobogan ab. Grobogan ab. Kendal ab. Kendal ab. Pati ab. Rembang ab. Flora ab. Rembang ab. Jepara ab. Jepara ab. Jepara ab. Karanganyar ab. Karanganyar ab. Kudus odia Surakarta ab. Karanganyar ab. Karanganyar ab. Magelang ab. Banyumas ab. Banyumas ab. Banyumas ab. Banyumas ab. Banyumas ab. Cilacap ab. Cilacap ab. Cilacap ab. Lurbalinga ab. Purbalinga ab. Pekalongan ab. Pekalongan	Semarang Utara Semarang Selatan Ungaran Tuntang Kradenan Kedungjati Patebon Kendal Karangtengah P a t i Rombang Hlora Lasem J u a n a Jepara Mayong Jekulo Serengan Lojogodong Karangnyar Mojolaban Mojosongo Wonogiri Klaten Kabonarum Goncang Mertoyudan Muntilan Grabag Kepil Purworejo Frembun Gomborg Temanggung Parakan Banyumas Ajibarang Cilacap Cilacap Cilacap Majerang Cilacap Cilacap Majerang Pobotsari Purbalingga Purworejo Klan Purbalingga Purworejo Klan Purbalingga Purworejo Klan Pok Pekalongan Barat Wiradesa	SMPN 24 Semarang SMPN 25 Semarang SMPN 3 Ungaran SMPN 2 Tuntang SMPN Kradenan SMPN 2 Kedungjati SMPN Patebon SMPN 3 Kendal SMPN 2 Grogol SMPN 6 Pati SMPN 4 Blore SMPN 2 Lawem SMPN 2 Lawem SMPN 2 Jewilo SMPN 3 Karanganyar SMPN 3 Karanganyar SMPN 10 Josongo SMPN 3 Karanganyar SMPN 5 Wonogiri SMPN 5 Wonogiri SMPN 5 Wonogiri SMPN 5 Wonogiri SMPN 6 Purvorejo SMPN 8 Condarg SMPN Mertoyudan SMPN 3 Muntilan SMPN 3 Muntilan SMPN 3 Ferbun SMPN 3 Condong SMPN 4 Temanggng SMPN 4 Temanggng SMPN 2 Parakan SMPN 3 Gombong SMPN 4 Temanggng SMPN 2 Parakan SMPN 3 Gombong SMPN 4 Temanggng SMPN 3 Ajibarang SMPN 3 Cilongok SMPN 5 Cilacap SMPN 5 Cilacap SMPN 5 Cilacap SMPN 7 Cilacap SMPN 7 Fekalongun SMPN 8 Purvorejo Ulampok SMPN 9 Purworejo Ulampok SMPN 1 Purworejo Ulampok SMPN 2 Wirwdesa	Ka SMPN 1 Semarang Ka SMPN 1 Ungaran Ka SMPN 1 Ungaran Ka SMPN 1 Tuntang Ka SMPN Kuwu Ka SMPN 1 Kedungjati Ka SMPN 2 Kendal Ka SMPN 2 Resubang Ka SMPN 2 Blora Ka SMPN 1 Jepara Ka SMPN 1 Karanganyar Ka SMPN 1 Karanganyar Ka SMPN 1 Konogiri Ka SMPN 2 Boyolali Ka SMPN 2 Boyolali Ka SMPN 1 Wonogiri Ka SMPN 1 Wonogiri Ka SMPN 1 Wonogiri Ka SMPN 1 Fondang Ka SMPN 1 Purworejo Ka SMPN 1 Purworejo Ka SMPN 1 Parakan Ka SMPN 1 Fondang Ka SMPN 1 Parakan Ka SMPN 1 Banyumas Ka SMPN 2 Majenang Ka SMPN 2 Klampok Ka SMPN 2 Klampok Ka SMPN 2 Klampok

_	,	7	
Kab. Batang	Limpung	SMPH 2 Limpung	Ka SHPH 1 Limpung.
Kab. Batang	Tulis	SUPU 2 Tulis	Ka SMPH 2 Batang.
Kab. Brebes	Bularamba	SHPN Bulokamba	Ka SMPH 3 Brebes.
Mab. Brebes	Bumiayu	SNPN 2 Eumiayu	Ka MMPH † Bumiayu.
Kodya Tegal	Tegal Batat	SUPN 13 Tegal	Ka SliPH 1 Tegal.
Kab. Tegah	digerna	SIPN 3 Adiwerna	Ka SMPN Dukuhturi.
Kab. Tegal	Slawi	S.:PI: 3 Slawi	Ka SNPN † Slawe.
Kab. Pemalang	Penal ang	SMPN 5 Penalang	Ka SMPN 3 Pemalang.
Kab. Wonoso'oo	Mojotengah	SMPH Nojotengah	Ka SIPN 2 Wonosobo.
Kab. Jepara	Kerimun Jawa	SMPM Karimun Jawa	Ka SMPN 2 Jepara.
Kab. Semarang	Ungaran	SMAN 2 Ungaran	Ka SHAH Urgaran.
Kab, Kerdal	Sukorejo	SMAN Sukorejo	Ka SHAH Kendal.
Kab. Grobogan	Kradenan	SMAN Kradenan	Ka SMAN 1 Purwodedi.
Kab, Jepara	Pedengean	SMAN Pedangaan	Ka SMAH Jepara
Kod. Surakarta	Surakarta	SMAH 7 Surakarta	Ka SHAN 3 Surakarta.
Kab. Klaten	Prembenan	SMAN Prambanan	Ka SMAN 2 Klaten.
Kab. Sragen	Condeng	SMAN Gordang	Ka SHAH 1 Sragen.
Kab. Karanganyar	Jumapolo	SIAN Jumapolo	Ka SHAN 1 Karanganyar.
Kab. Monogiri	Muryantoro	SMAN Turyantoro	Ka SHAH 1 Wonogiri.
Kab. Kebumen	Kutowinangun	SMAM Kutowinangun	Ka SHAN Kebumen.
Kab. Banyumas	Jatilawang	SMAN Jatilawarg	Ka SMAN 2 Purqokerto.
Kab. Cilacap	Cilacap	SMAN 2 Cilacap	Ka SHAN 1 Cilacap.
Kab. Pekalorgan	Kedungwuni	SMAH Kedungwuni	Ka SMAN 1 Pekalongan.
Kab. Batang	Subah	SMAM Subah	Ka SMAH Batang.
Kab. Pemalang	Pemal and	SIIAN 2 Pemalang	Ka SHAN 1 Penalang.
Kab. Tegal	Pangkah	SMAM Pangkah	Ka SHAN 1 Slawi.
Kab. Brebes	Banjarharjo	SMAN Banjarharjo	Ka SHAH 1 Brebes.
Kodya Semarang	Genuk	SMAH 10 Semarang	Ka SMAW 3 Semarang.

DESTATTA

NIP. 130430070.